



## Good Governance Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan: Tinjauan Literatur Sistematis Tahun 2015–2025

(Good Governance in Realizing Government Accountability and Transparency: A Systematic Literature Review 2015–2025).

**Andra Dewi Mareta, Rendra Brajahadi, Januar Ichsan, Andreas Eko**

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No.36A, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.61656/pmar.v7i1.452>.

### ABSTRACT

**Purpose:** This study aims to examine the scientific literature on good governance, focusing on government accountability and transparency. Using a Systematic Literature Review (SLR) approach based on the PRISMA guidelines, this study seeks to present a systematic and comprehensive synthesis of the role of these two aspects in public governance.

**Method:** The method used was SLR with the PRISMA protocol, which allows for a structured and transparent literature selection process. Ten articles meeting the inclusion criteria were selected from various reliable scientific databases spanning the period 2015–2025, allowing for in-depth and targeted analysis.

**Findings:** The study's findings indicate that transparency and accountability are two distinct yet complementary pillars within the framework of good governance. Both contribute to government legitimacy and public trust, despite challenges such as the difficulty of measuring transparency's impact, the tendency to equate transparency with accountability, institutional resistance to openness, and contextual differences in how transparency translates into public trust.

**Implication:** The implication of these findings is the need for an integrated public governance framework. Such a framework should combine proactive information disclosure, robust accountability mechanisms, and increased capacity for citizen participation. This will achieve sustainable governance and strengthen government legitimacy.

**Originality:** The uniqueness of this research lies in the use of the SLR approach with the PRISMA protocol to examine the relationship between good governance, transparency, and accountability. By reviewing the literature from 2015–2025, this research provides a comprehensive synthesis and offers new perspectives for the development of public governance theory and practice.

**Keywords:** good governance, accountability, transparency, public trust, systematic literature review.

### ABSTRAK

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menelaah literatur ilmiah mengenai good governance dengan fokus pada akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) berbasis panduan PRISMA, penelitian ini berusaha menyajikan sintesis yang sistematis dan komprehensif tentang peran kedua aspek tersebut dalam tata kelola publik.

**Metode:** Metode yang digunakan adalah SLR dengan protokol PRISMA, yang memungkinkan proses seleksi literatur dilakukan secara terstruktur dan transparan. Dari berbagai basis data ilmiah terpercaya, diperoleh sepuluh artikel yang memenuhi kriteria inklusi dalam rentang waktu 2015–2025, sehingga analisis dapat dilakukan secara mendalam dan terarah.

**Temuan:** Hasil kajian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar berbeda namun saling melengkapi dalam kerangka good governance. Keduanya berkontribusi terhadap legitimasi pemerintah dan kepercayaan publik, meskipun terdapat tantangan seperti kesulitan mengukur dampak transparansi, kecenderungan menyamakan transparansi dengan akuntabilitas, resistensi institusional terhadap keterbukaan, serta perbedaan konteks dalam penerjemahan transparansi menjadi kepercayaan warga.

**Implikasi:** Implikasi dari temuan ini adalah perlunya kerangka tata kelola publik yang terintegrasi. Kerangka tersebut harus menggabungkan pengungkapan informasi secara proaktif, mekanisme akuntabilitas yang kuat, serta peningkatan kapasitas partisipasi warga. Dengan demikian, tata kelola yang berkelanjutan dapat tercapai dan legitimasi pemerintah semakin diperkuat.

**Orisinalitas:** Keunikan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan SLR dengan protokol PRISMA untuk menelaah hubungan antara good governance, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan meninjau literatur dalam periode 2015–2025, penelitian ini memberikan sintesis yang komprehensif sekaligus menawarkan perspektif baru bagi pengembangan teori maupun praktik tata kelola publik.

**Kata Kunci:** good governance, akuntabilitas, transparansi, kepercayaan publik, tinjauan literatur sistematis.



**Article info:** Received: 21 December 2025; Revised: 17 January 2026; Accepted: 25 January 2026

**Correspondence:**

\* Andra Dewi Mareta and Email: [dewi\\_adm@students.uns.ac.id](mailto:dewi_adm@students.uns.ac.id)

**Recommended citation:**

Mareta, A. D., Brajahadi, R. Ichsan, J. & Eko, A. (2026). Good Governance Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan: Tinjauan Literatur Sistematis Tahun 2015–2025 (Good Governance in Realizing Government Accountability and Transparency: A Systematic Literature Review 2015–2025), *Public Management and Accounting Review (PMAR)*, 7 (1), pp 35-45.

## 1. PENDAHULUAN

Tata kelola publik yang baik (*good governance*) telah bertransformasi dari sekadar prinsip normatif menjadi imperatif strategis yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di era kontemporer. Dalam dua dekade terakhir, tekanan global untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, responsif, dan partisipatif semakin intensif, didorong oleh berbagai kekuatan yang saling berinteraksi: meningkatnya ekspektasi warga terhadap standar integritas dan keterbukaan pemerintah; kemajuan teknologi informasi yang secara dramatis mengurangi biaya dan hambatan akses terhadap informasi publik; serta meluasnya gerakan internasional seperti *Open Government Partnership* yang mendorong adopsi standar keterbukaan sebagai norma global pemerintahan demokratis. Barbera et al. (2025) dalam kajian tematik yang komprehensif menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan dua dari tantangan paling mendasar dan paling "licin" dalam upaya reshaping pelayanan publik abad ke-21, karena keduanya melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak hanya bersifat teknis administratif tetapi juga menyentuh dimensi politik, etis, dan demokratis yang paling mendalam dalam hubungan antara negara dan warganya. Dalam konteks inilah kajian sistematis tentang *good governance*, akuntabilitas, dan transparansi pemerintahan menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan secara komprehensif dan berbasis bukti ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Konseptualisasi *good governance* sendiri telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam literatur administrasi publik dan ilmu politik (Samaratunge, 2021). Awalnya didominasi oleh perspektif manajerial yang menekankan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik, konsep *good governance* kemudian berkembang menjadi konstruk multidimensi yang mencakup akuntabilitas, transparansi, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas pemerintah, kesetaraan, dan inklusivitas. Mabilard dan Zumofen (2017) dalam kajian teoritis mereka yang sangat berpengaruh menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas, meskipun keduanya merupakan pilar fundamental *good governance*, merupakan dua konsep yang secara ontologis berbeda dan sering kali keliru digunakan sebagai sinonim dalam literatur maupun praktik pemerintahan. Perbedaan konseptual yang mendasar ini memiliki implikasi kebijakan yang sangat penting: program *good governance* yang mengasumsikan bahwa transparansi secara otomatis menghasilkan akuntabilitas, atau sebaliknya, berisiko merancang intervensi yang tidak tepat sasaran dan gagal menghasilkan perubahan tata kelola yang substantif dan berkelanjutan. Pemahaman yang lebih presisi tentang hubungan antara kedua konsep ini menjadi landasan epistemologis yang tidak dapat diabaikan dalam desain reformasi *good governance* yang efektif.

Transparansi pemerintahan sebagai salah satu pilar utama *good governance* telah menjadi objek penelitian yang sangat produktif dalam satu dekade terakhir, menghasilkan akumulasi pengetahuan empiris yang kaya namun juga kerap menunjukkan hasil yang bahkan bertentangan satu sama lain. Cucciniello, Porumbescu, dan Grimmelikhuijsen (2017) dalam tinjauan sistematis mereka yang monumental terhadap 187 studi tentang transparansi pemerintahan selama 25 tahun menemukan bahwa dampak transparansi terhadap berbagai *outcome* pemerintahan, termasuk kepercayaan publik, akuntabilitas, dan persepsi korupsi, sangat bergantung pada bentuk transparansi yang diterapkan, konteks institusional di mana transparansi diimplementasikan, serta karakteristik warga yang menerima informasi yang diungkapkan oleh pemerintah. Kompleksitas hubungan antara transparansi dan dampaknya ini menantang asumsi sederhana bahwa "lebih banyak informasi selalu lebih baik" dan menuntut pemahaman yang lebih nuansir tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan transparansi berfungsi sebagai mekanisme *good governance* yang efektif. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya

pendekatan kontekstual dalam desain kebijakan transparansi yang benar-benar bermakna bagi peningkatan kualitas *good governance* secara keseluruhan.

Akuntabilitas publik sebagai dimensi lain dari *good governance* juga menghadapi tantangan konseptual dan empiris yang tidak kalah kompleksnya. Schillemans (2015) dalam kajian mendalamnya tentang bagaimana manajer publik mengelola akuntabilitas publik menemukan bahwa akuntabilitas dalam praktiknya jauh lebih kompleks dan multidimensi dibandingkan dengan representasinya dalam literatur normatif yang cenderung memandang akuntabilitas sebagai mekanisme yang relatif linear dan sederhana. Manajer publik nyatanya harus mengelola tuntutan akuntabilitas yang berasal dari berbagai *forum* yang berbeda secara simultan parlemen, pengadilan, lembaga audit, media, dan masyarakat sipil dengan logika dan ekspektasi yang seringkali bertentangan satu sama lain. Schillemans (2016) lebih lanjut menunjukkan bahwa kalibrasi mekanisme akuntabilitas publik, yakni menyesuaikan bentuk, frekuensi, dan intensitas pertanggungjawaban dengan karakteristik tugas dan risiko organisasi publik, merupakan seni tata kelola yang sangat membutuhkan pemahaman mendalam tentang konteks institusional spesifik dari setiap organisasi pemerintahan. Kompleksitas ini mengkritik pandangan mekanistik tentang akuntabilitas dan menuntut pendekatan yang lebih kontekstual, fleksibel, dan berbasis pembelajaran dalam penguatan tata kelola yang akuntabel.

Dimensi kepercayaan publik (*public trust*) sebagai hasil dari tata kelola yang baik juga menarik perhatian akademik yang sangat besar, mengingat kepercayaan warga terhadap institusi pemerintah merupakan modal sosial yang sangat kritis bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan demokratis. Grimmelikhuijsen dan Feeney (2017) dalam kajian mereka tentang kerangka adopsi pemerintahan terbuka di pemerintah daerah menunjukkan bahwa kepercayaan warga terhadap pemerintah dipengaruhi tidak hanya oleh paparan terhadap informasi yang diungkapkan, tetapi juga oleh keyakinan awal warga tentang integritas pemerintah, relevansi informasi yang diungkapkan dengan kebutuhan dan kepentingan nyata warga, serta kualitas saluran komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi tersebut. Grimmelikhuijsen dan Knies (2017) menambahkan dimensi penting dengan mengembangkan dan memvalidasi skala pengukuran kepercayaan warga terhadap organisasi pemerintah, menemukan bahwa kepercayaan merupakan konstruk multidimensi yang mencakup dimensi kompetensi, integritas, dan kebajikan ketiganya perlu diperkuat secara bersamaan untuk membangun kepercayaan publik yang kokoh dan berkelanjutan terhadap institusi pemerintahan demokratis.

Mengingat urgensi dan kompleksitas yang telah dipaparkan, penelitian ini hadir untuk memberikan pemetaan sistematis terhadap literatur ilmiah terkini mengenai *good governance* dalam kaitannya dengan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan dalam rentang tahun 2015–2025. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana hubungan konseptual dan empiris antara transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar *good governance* dipahami dalam literatur terkini? (2) Faktor-faktor apa yang secara dominan memengaruhi keberhasilan implementasi prinsip-prinsip *good governance*, terutama transparansi dan akuntabilitas, dalam konteks yang beragam? dan (3) Apa saja tantangan sistemik yang menghambat terwujudnya *good governance* yang autentik dan berdampak nyata bagi kepercayaan serta kesejahteraan warga? Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi, mensintesis, dan menganalisis literatur ilmiah terkini mengenai *good governance* melalui pendekatan SLR yang sistematis dan transparan, guna menghasilkan sintesis pengetahuan yang dapat menjadi rujukan bagi peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi reformasi tata kelola yang lebih efektif, inklusif, dan berdampak nyata bagi peningkatan kepercayaan publik dan kualitas pemerintahan secara berkelanjutan.

## 2. METODE

### 2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), yaitu metode penelitian sintesis ilmiah yang bertujuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan seluruh bukti ilmiah yang relevan dengan pertanyaan penelitian tertentu secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi. SLR dipilih karena kemampuannya menghasilkan peta pengetahuan yang komprehensif dari literatur yang tersebar di berbagai sumber sekaligus meminimalkan bias seleksi subjektif. Panduan PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) sebagaimana diperbarui oleh Page et al. (2021) digunakan sebagai kerangka pelaporan untuk memastikan kualitas, transparansi, dan kelengkapan proses review yang dilakukan dalam penelitian ini.

## 2.2. Sumber dan Pencarian Data

Pencarian literatur dilakukan pada basis data ilmiah terpercaya yang dapat diakses secara terbuka, meliputi Google Scholar, Scopus, DOAJ (*Directory of Open Access Journals*), dan Semantic Scholar. Kata kunci yang digunakan mencakup: "good governance", "public accountability", "government transparency", "open government", "public trust", "accountability mechanisms", "transparency and accountability", "e-government transparency", serta kombinasinya menggunakan operator Boolean AND/OR. Pencarian dibatasi pada artikel yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2025 untuk memastikan relevansi dan kebaruan literatur yang digunakan dalam analisis.

Kriteria Inklusi:

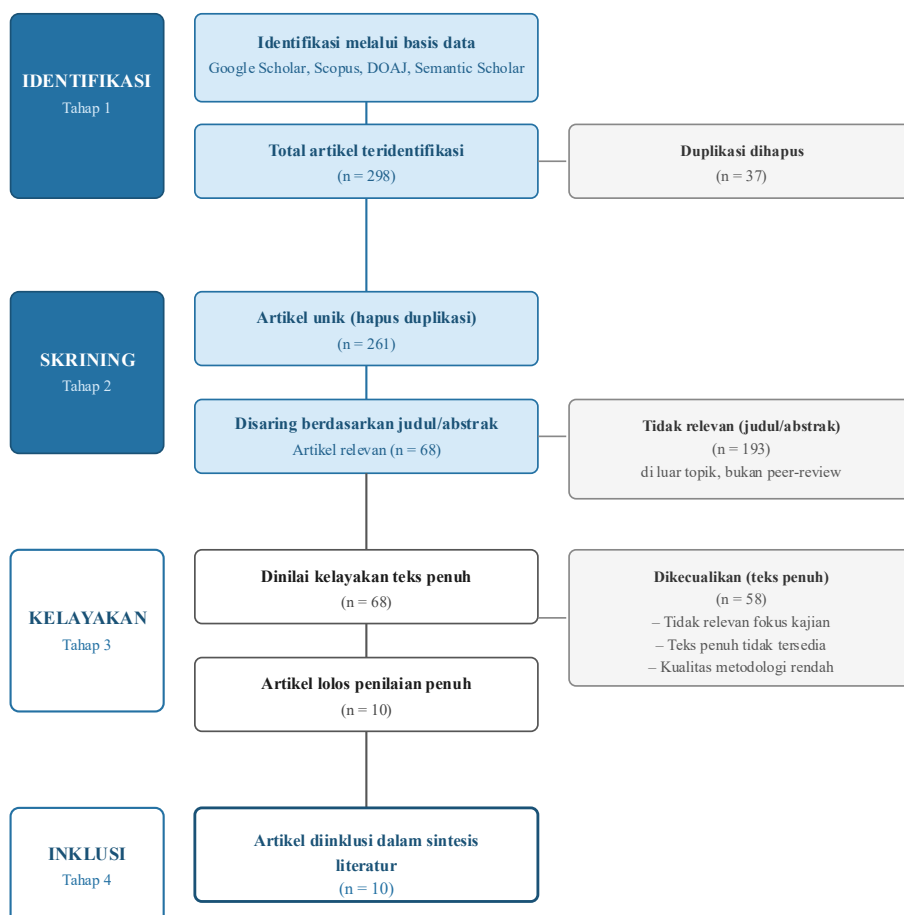
1. Artikel diterbitkan pada rentang tahun 2015–2025
2. Artikel berbahasa Indonesia atau Inggris
3. Membahas good governance, akuntabilitas, dan/atau transparansi pemerintahan
4. Tersedia dalam akses terbuka atau dapat diakses melalui basis data terpercaya
5. Merupakan artikel penelitian empiris, kajian konseptual, atau tinjauan literatur yang telah melalui proses peer-review

Kriteria Eksklusi:

1. Artikel berbentuk editorial, opini singkat, atau ulasan buku
2. Artikel yang tidak secara spesifik membahas good governance, akuntabilitas, atau transparansi pemerintahan
3. Artikel yang tidak dapat diakses teks lengkapnya (full text)
4. Artikel yang merupakan duplikasi dari hasil pencarian berbeda

## 2.3. Proses Seleksi Artikel

Proses seleksi dilakukan dalam empat tahap sesuai alur PRISMA ([Gambar 1](#)).



**Gambar 1.** Tahapan Seleksi Artikel dengan PRISMA

Sumber: Data diolah – 2025

Berdasarkan Gambar 1, proses seleksi dilakukan dalam empat tahap sesuai alur PRISMA. Tahap pertama adalah identifikasi, di mana ditemukan total 298 artikel dari seluruh basis data yang digunakan (Google Scholar: 142, Scopus: 96, DOAJ & Semantic Scholar: 60). Tahap kedua adalah screening berdasarkan judul dan abstrak, di mana setelah penghapusan 37 artikel duplikasi diperoleh 261 artikel unik, kemudian disaring sehingga tersisa 68 artikel relevan. Tahap ketiga adalah penilaian kelayakan (eligibility) berdasarkan pembacaan teks lengkap, di mana 58 artikel dikecualikan karena tidak relevan dengan fokus kajian, tidak dapat diakses secara penuh, atau kualitas metodologi yang tidak memenuhi standar peer-review yang ditetapkan. Tahap keempat adalah inklusi akhir, menghasilkan 10 artikel final yang digunakan sebagai basis analisis dalam penelitian ini.

## 2.4. Ekstraksi dan Analisis Data

Data diekstraksi dari setiap artikel menggunakan formulir ekstraksi terstandar yang mencakup: nama penulis, tahun terbit, judul, jurnal, konteks kajian, metode penelitian, temuan utama, dan implikasi kebijakan. Analisis dilakukan secara tematik (thematic analysis) untuk mengidentifikasi pola, tren, dan tema dominan yang muncul dari seluruh literatur yang diinklusi, sehingga menghasilkan sintesis pengetahuan yang koheren dan dapat menjadi panduan bagi praktisi dan pembuat kebijakan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Karakteristik Umum Artikel yang Diinklusi

Berdasarkan hasil seleksi menggunakan protokol PRISMA, diperoleh 10 artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan siap untuk dianalisis secara tematik. Artikel-artikel tersebut berasal dari berbagai jurnal internasional bereputasi yang terindeks di basis data ilmiah terpercaya, mencakup jurnal administrasi publik, manajemen publik, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan. Dari segi tahun publikasi, distribusi artikel tersebar antara tahun 2015 hingga 2025, dengan konsentrasi signifikan pada periode 2017–2024 yang mengindikasikan meningkatnya minat akademik global terhadap isu akuntabilitas dan transparansi sebagai pilar *good governance*. Dari segi metodologi, terdapat variasi yang kaya, mulai dari tinjauan literatur sistematis, kajian konseptual-teoretis, penelitian kuantitatif survei, studi kasus kualitatif, hingga kajian bibliometrik. Konteks geografis penelitian mencakup kawasan Eropa Barat, Amerika Utara, Afrika, dan kajian komparatif lintas negara, mencerminkan relevansi topik ini secara global.

Tabel 1 menyajikan ringkasan dari 10 artikel yang diinklusi, mencakup informasi penulis, tahun terbit, judul, jurnal, metode, dan temuan utama yang diperoleh dari masing-masing artikel secara terstruktur dan sistematis sebagai basis analisis tematik penelitian ini.

**Tabel 1.** Hasil Inklusi Jurnal dalam *Systematic Literature Review*

No	Penulis	Tahun	Judul Artikel	Jurnal	Metode	Temuan Utama
1	Cucciniello, Porumbescu & Grimmelikhuijsen	2017	25 years of transparency research: Evidence and future directions	<i>Public Administration Review</i>	SLR (187 studi)	Dampak transparansi terhadap <i>outcome</i> pemerintahan sangat kontekstual; enam tipe transparansi dan sembilan <i>outcome</i> teridentifikasi
2	Mabillard & Zumofen	2017	The complex relationship between transparency and accountability: A synthesis and contribution to existing frameworks	<i>Public Policy and Administration</i>	Kajian konseptual-teoretis	Transparansi dan akuntabilitas adalah konsep berbeda namun saling bergantung; hubungan keduanya bersifat bidireksional dan kontekstual
3	Meijer, 't Hart & Worthy	2018	Assessing government transparency: An interpretive framework	<i>Administration &amp; Society</i>	Kajian konseptual & penilaian kritis	Kerangka interpretatif lima dimensi untuk menilai transparansi pemerintah; kompleksitas nilai

No	Penulis	Tahun	Judul Artikel	Jurnal	Metode	Temuan Utama
						tidak dapat diukur secara linier
4	Schillemans	2015	Managing public accountability: How public managers manage public accountability	<i>International Journal of Public Administration</i>	Kajian konseptual-empiris	Manajer publik mengelola tuntutan akuntabilitas ganda dari berbagai <i>forum</i> dengan strategi yang beragam
5	Schillemans	2016	Calibrating public sector accountability: Translating experimental findings to public sector accountability	<i>Public Management Review</i>	Kajian eksperimen tal-konseptual	Kalibrasi mekanisme akuntabilitas sesuai konteks organisasi sangat penting; satu ukuran tidak cocok untuk semua
6	Krah & Mertens	2020	Transparency in local governments: Patterns and practices of twenty-first century	<i>State and Local Government Review</i>	SLR-analisis bibliometrik	Pertumbuhan riset transparansi pemerintah daerah pesat di Eropa dan Amerika; teknologi informasi menjadi instrumen utama
7	Piotrowski	2017	The "open government reform" movement: The case of the open government partnership and U.S. transparency policies	<i>American Review of Public Administration</i>	Analisis konten	Kebijakan transparansi pemerintah AS didominasi transparansi tradisional; keterbukaan proaktif masih terbatas
8	Lourenço, Piotrowski & Ingrams	2017	Open data driven public accountability	<i>Transforming Government: People, Process and Policy</i>	Analisis konseptual	Data terbuka sebagai mekanisme akuntabilitas publik; perlu dukungan infrastruktur dan literasi data warga
9	Overman & Schillemans	2022	Toward a public administration theory of felt accountability	<i>Public Administration Review</i>	Kajian konseptual-eksperimen tal	"Akuntabilitas yang dirasakan" ( <i>felt accountability</i> ) oleh individu birokrat lebih menentukan perilaku akuntabel daripada mekanisme formal
10	Pérez-Durán	2024	Twenty-five years of accountability research in public administration: Authorship, themes, methods, and future trends	<i>Public Administration</i>	SLR bibliometrik (277 artikel)	Dominasi riset akuntabilitas pada dimensi <i>supply-side</i> ; akuntabilitas <i>demand-side</i> dan peran warga sangat kurang diteliti

Sumber: Kajian literatur – diolah penulis (2025)

### 3.2. Hubungan Kompleks antara Transparansi dan Akuntabilitas dalam Good Governance

Tema pertama yang sangat dominan dalam literatur yang dianalisis adalah kompleksitas hubungan konseptual dan empiris antara transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar *good governance*. Mabillard dan Zumofen (2017) melalui kajian teoritis yang komprehensif menegaskan bahwa kedua konsep ini, meskipun sering diperlakukan sebagai sinonim atau dikaitkan secara otomatis, merupakan entitas konseptual yang berbeda dengan logika dan mekanisme kerja masing-masing. Transparansi pada intinya berkaitan dengan ketersediaan dan aksesibilitas informasi kepada publik, sementara

akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban menjawab pertanyaan dan menerima konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Meski keduanya saling menguatkan transparansi memfasilitasi akuntabilitas dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengawasan, dan akuntabilitas menciptakan insentif bagi transparansi hubungan di antara keduanya bersifat bidireksional, tidak linear, dan sangat bergantung pada konteks institusional, politik, serta budaya di mana keduanya diimplementasikan. Kerangka konseptual yang menggabungkan kedua dimensi ini secara terintegrasi menjadi fondasi penting bagi desain kebijakan *good governance* yang komprehensif.

Meijer, 't Hart, dan Worthy (2018) menambahkan dimensi penting dengan mengembangkan kerangka interpretatif untuk menilai transparansi pemerintah yang melampaui pendekatan pengukuran kuantitatif sederhana. Kerangka yang mereka kembangkan mengakui bahwa transparansi melibatkan nilai-nilai yang kompleks, kontekstual, dan terkadang saling bertentangan antara hak publik atas informasi dengan perlindungan privasi, antara keterbukaan yang mendorong akuntabilitas dengan risiko pengungkapan informasi sensitif yang dapat membahayakan kepentingan publik. Evaluasi transparansi pemerintah, menurut mereka, tidak dapat dilakukan dengan satu metrik tunggal, melainkan membutuhkan pendekatan interpretatif yang mampu mempertimbangkan keragaman nilai dan tujuan yang dikejar melalui kebijakan transparansi dalam konteks institusional yang spesifik. Sementara itu, Cucciniello et al. (2017) menemukan dari tinjauan 25 tahun riset transparansi bahwa meskipun transparansi secara umum dikaitkan dengan sembilan *outcome* positif—meliputi akuntabilitas, legitimasi, kepercayaan, partisipasi, hingga persepsi korupsi—bukti empiris tentang hubungan ini sangat tidak konsisten dan kerap menghasilkan temuan yang berlawanan, mengindikasikan bahwa konteks, desain, dan implementasi kebijakan transparansi menentukan apakah transparansi benar-benar berfungsi sebagai instrumen *good governance* yang efektif atau justru menghasilkan dampak yang tidak diharapkan.

### 3.3. Manajemen Akuntabilitas Publik dalam Praktik Good Governance

Tema kedua yang sangat menonjol dalam literatur yang dianalisis adalah dinamika pengelolaan akuntabilitas publik dalam praktik nyata pemerintahan. Schillemans (2015) melalui kajian empiris-konseptualnya menemukan bahwa para manajer publik mengembangkan berbagai strategi aktif dalam mengelola tuntutan akuntabilitas yang datang dari berbagai forum secara simultan mulai dari strategi memberikan prioritas pada forum tertentu, membangun hubungan kerja yang produktif dengan para pemberi tugas (*principals*), hingga menciptakan narasi pertanggungjawaban yang koheren di tengah tuntutan yang seringkali saling bertentangan. Temuan ini menggeser pandangan tentang akuntabilitas dari sekadar mekanisme kontrol eksternal menjadi proses manajemen aktif yang membutuhkan kompetensi, pertimbangan etis, dan kapasitas organisasional yang tinggi. Overman dan Schillemans (2022) memperluas perspektif ini dengan mengembangkan teori "akuntabilitas yang dirasakan" (*felt accountability*) dalam administrasi publik, menunjukkan bahwa perilaku akuntabel individu birokrat lebih ditentukan oleh persepsi subjektif mereka tentang apakah dan bagaimana mereka akan dimintai pertanggungjawaban dibandingkan dengan keberadaan mekanisme akuntabilitas formal yang seringkali tidak berdampak jika tidak diinternalisasi secara psikologis oleh aparat yang bersangkutan.

Schillemans (2016) menambahkan kontribusi penting dengan konsep kalibrasi akuntabilitas, yakni proses menyesuaikan desain dan intensitas mekanisme akuntabilitas dengan karakteristik spesifik organisasi, tugas, dan konteks risiko yang dihadapi. Dari analisis temuan eksperimental, ia menemukan bahwa intensitas akuntabilitas yang terlalu tinggi dapat menghasilkan efek paradoks seperti perilaku *blame avoidance*, konsentrasi berlebihan pada aspek yang mudah diukur, dan penghindaran risiko yang berlebihan justru menghambat kinerja dan kreativitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Pérez-Durán (2024) melengkapi gambaran ini dengan tinjauan bibliometrik yang komprehensif terhadap 277 artikel tentang akuntabilitas selama 25 tahun, menemukan bahwa literatur akuntabilitas masih sangat didominasi oleh perspektif *supply-side* yang memusatkan perhatian pada mekanisme formal pemerintah, sementara dimensi *demand-side* yang menempatkan warga sebagai aktor aktif dalam meminta pertanggungjawaban pemerintah masih sangat kurang diteliti dan dipahami. Ketidakseimbangan ini memiliki implikasi serius bagi desain reformasi akuntabilitas yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan dan kapasitas warga sebagai pemangku kepentingan utama dalam ekosistem *good governance* yang demokratis.

### 3.4. Open Government dan Data Terbuka sebagai Instrumen Good Governance

Tema ketiga yang sangat relevan dalam literatur yang dianalisis adalah peran *open government* dan data terbuka sebagai instrumen modern untuk mewujudkan *good governance* yang lebih akuntabel dan transparan. Piotrowski (2017) melalui analisis konten terhadap rencana aksi *Open Government*

Partnership Amerika Serikat menemukan bahwa meskipun gerakan open government secara retorik berkomitmen terhadap transparansi yang transformatif, implementasinya masih sangat didominasi oleh pendekatan transparansi tradisional yang bersifat reaktif memberikan informasi hanya ketika diminta daripada transparansi proaktif yang secara sistematis mengungkapkan informasi yang relevan sebelum diminta oleh warga. Kesenjangan antara retorika keterbukaan dengan praktik nyata transparansi pemerintah ini mencerminkan tantangan institusional dan politik yang mendalam dalam transformasi budaya organisasi publik menuju good governance yang genuin dan berpusat pada kebutuhan warga. [Lourenço, Piotrowski, dan Ingrams \(2017\)](#) memperluas perspektif ini dengan mengkaji bagaimana data terbuka (open data) dapat menjadi mekanisme akuntabilitas publik yang efektif, menemukan bahwa potensi data terbuka sebagai instrumen good governance baru dapat terealisasi jika didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai, standar interoperabilitas data yang konsisten, dan yang paling krusial kapasitas literasi data yang memadai di kalangan warga dan organisasi masyarakat sipil yang hendak menggunakannya untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah secara mandiri dan kritis.

[Krah dan Mertens \(2020\)](#) melengkapi gambaran ini dengan tinjauan sistematis tentang transparansi pemerintah daerah abad ke-21, menemukan bahwa terdapat pertumbuhan riset yang sangat signifikan tentang topik ini terutama di Eropa dan Amerika Utara, dengan teknologi informasi menjadi instrumen utama dalam peningkatan transparansi pemerintah daerah. Mereka mengidentifikasi bahwa tekanan untuk menjadi transparan sebagian besar datang dari pengesahan Undang-Undang Kebebasan Informasi dan inisiatif data terbuka pemerintah, serta dari tuntutan warga yang semakin kritis terhadap keterbukaan pengelolaan sumber daya publik. Namun, mereka juga menemukan bahwa transparansi yang meningkat secara formal melalui regulasi dan teknologi tidak selalu berkorelasi dengan peningkatan kepercayaan warga, partisipasi publik, atau kualitas good governance secara substansial—menunjukkan bahwa transparansi formal perlu didukung oleh kapasitas interpretasi, dialog, dan responsivitas pemerintah yang memadai agar benar-benar berfungsi sebagai pilar good governance yang bermakna dalam kehidupan demokratis.

#### 4. SIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan mensintesis 10 artikel ilmiah terpilih mengenai good governance dalam kaitannya dengan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan melalui metode Systematic Literature Review dengan mengikuti panduan PRISMA untuk rentang tahun 2015–2025. Berdasarkan analisis tematik yang komprehensif, dapat disimpulkan beberapa hal penting yang menjadi kontribusi nyata penelitian ini bagi perkembangan ilmu administrasi publik dan praktik good governance secara luas.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar good governance yang secara konseptual berbeda namun saling bergantung dan memperkuat satu sama lain dalam hubungan yang bersifat bidireksional, tidak linear, dan sangat kontekstual. Kesalahan dalam menyamakan kedua konsep ini secara otomatis mengakibatkan desain kebijakan yang tidak tepat sasaran dan gagal menghasilkan perubahan tata kelola yang substantif. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu memahami secara mendalam logika dan mekanisme kerja masing-masing pilar sebelum merancang intervensi reformasi good governance yang efektif dan berkelanjutan dalam konteks institusional yang spesifik.

Dampak transparansi terhadap berbagai outcome good governance—termasuk kepercayaan publik, akuntabilitas, dan persepsi korupsi—sangat bergantung pada bentuk transparansi yang diterapkan, kualitas informasi yang diungkapkan, kapasitas warga untuk memproses dan menggunakan informasi tersebut, serta konteks institusional dan budaya di mana transparansi diimplementasikan. Bukti empiris yang tidak konsisten dari berbagai studi mengingatkan bahwa "lebih banyak informasi" tidak selalu berujung pada tata kelola yang lebih baik tanpa didukung oleh kondisi-kondisi pendukung yang memadai di sisi warga maupun institusi pemerintah.

Akuntabilitas publik dalam praktiknya jauh lebih kompleks daripada representasinya dalam teori normatif. Para manajer publik menghadapi tuntutan akuntabilitas yang beragam dari berbagai forum secara simultan, dan perilaku akuntabel individu birokrat lebih ditentukan oleh persepsi psikologis tentang kemungkinan dimintai pertanggungjawaban daripada oleh keberadaan mekanisme formal semata. Kalibrasi mekanisme akuntabilitas yang berlebihan bahkan dapat menghasilkan efek kontraproduktif yang melemahkan kinerja dan inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas.

Gerakan open government dan data terbuka menghadirkan peluang besar untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar good governance, namun potensi ini baru dapat terealisasi jika didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai, kapasitas literasi data warga yang tinggi, dan transformasi budaya organisasi publik dari transparansi reaktif menuju transparansi proaktif yang genuin. Kesenjangan antara komitmen retorik terhadap keterbukaan dan praktik nyata transparansi pemerintah menjadi tantangan fundamental yang perlu diatasi melalui reformasi institusional yang berani dan konsisten dalam jangka panjang.

#### 4.1. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, jumlah artikel yang dianalisis relatif terbatas, yaitu hanya sepuluh publikasi dalam rentang 2015–2025, sehingga hasil sintesis mungkin belum sepenuhnya merepresentasikan keseluruhan literatur yang ada. Kedua, penggunaan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan protokol PRISMA sangat bergantung pada kriteria inklusi dan eksklusi yang ditetapkan, sehingga ada kemungkinan literatur relevan terlewatkan. Ketiga, variasi konteks sosial, politik, dan budaya dalam setiap artikel membuat generalisasi hasil menjadi terbatas, karena hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan good governance dapat berbeda di tiap negara atau institusi. Keempat, penelitian ini tidak melakukan analisis empiris langsung, sehingga temuan lebih bersifat konseptual dan bergantung pada interpretasi dari literatur yang tersedia.

#### 4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut lima saran yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengembangan good governance: Pertama, bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, disarankan untuk mengembangkan kerangka kebijakan good governance yang secara eksplisit membedakan sekaligus mengintegrasikan pilar transparansi dan akuntabilitas, dengan merancang mekanisme operasional yang spesifik untuk masing-masing pilar serta mengukur dampaknya secara independen menggunakan indikator yang selaras dengan nilai publik yang ingin dicapai, bukan sekadar indikator kepatuhan formal yang tidak mencerminkan kualitas tata kelola secara substansial.

Bagi pimpinan organisasi publik di semua tingkatan, disarankan untuk membangun budaya akuntabilitas yang diinternalisasi secara psikologis oleh seluruh aparatur bukan hanya mekanisme formal yang bersifat eksternal dengan mengembangkan sistem feedback yang konstruktif, menciptakan lingkungan yang aman untuk mengakui kesalahan dan belajar dari kegagalan, serta mengkalibrasi intensitas mekanisme akuntabilitas sesuai dengan konteks risiko dan karakteristik tugas spesifik dari setiap unit organisasi.

Bagi akademisi dan peneliti di bidang administrasi publik, disarankan untuk memperluas fokus penelitian pada dimensi demand-side akuntabilitas yang selama ini sangat kurang diteliti, termasuk bagaimana warga menggunakan informasi pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban, bagaimana kapasitas masyarakat sipil dalam pengawasan good governance dapat dikembangkan secara sistematis, serta bagaimana konteks institusional dan budaya memengaruhi efektivitas berbagai mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam beragam setting nasional dan lokal.

Bagi penyelenggara program open government dan inisiatif data terbuka, disarankan untuk menggeser paradigma dari transparansi reaktif berbasis permintaan menuju transparansi proaktif yang secara sistematis mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi yang paling relevan dengan kebutuhan nyata warga, disertai dengan program pengembangan kapasitas literasi data yang inklusif agar manfaat data terbuka benar-benar dapat diakses dan digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Bagi lembaga donor internasional dan mitra pembangunan yang mendukung reformasi good governance di negara-negara berkembang, disarankan untuk memastikan bahwa standar dan kerangka good governance yang dipromosikan benar-benar disesuaikan dengan konteks institusional, kapasitas aparatur, dan prioritas pembangunan lokal—menghindari transplantasi model tata kelola dari negara maju yang tidak mempertimbangkan kondisi spesifik negara penerima dukungan dan justru berpotensi menciptakan façade keterbukaan yang tidak mencerminkan peningkatan substansial dalam kualitas good governance yang dirasakan oleh warga.

Penelitian ini menegaskan bahwa good governance tidak dapat dilepaskan dari peran transparansi dan akuntabilitas sebagai dua pilar utama yang saling melengkapi dalam memperkuat legitimasi pemerintah dan kepercayaan publik. Melalui telaah sistematis terhadap literatur 2015–2025 dengan pendekatan

SLR berbasis PRISMA, ditemukan bahwa meskipun keduanya memiliki kontribusi yang berbeda, keduanya sama-sama krusial dalam membangun tata kelola publik yang berkelanjutan. Tantangan yang muncul, seperti kesulitan pengukuran dampak transparansi, resistensi institusional terhadap keterbukaan, serta variasi konteks penerapan, menunjukkan perlunya kerangka tata kelola yang terintegrasi. Dengan menggabungkan pengungkapan informasi proaktif, mekanisme akuntabilitas yang kuat, dan partisipasi warga, tata kelola publik dapat lebih efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dipercaya masyarakat.

### **Pernyataan AI Generatif**

Penulis menyatakan bahwa AI generatif digunakan dalam pembuatan manuskrip ini. Penulis menegaskan bahwa, meskipun AI generatif (ChatGPT, GPT-5) digunakan untuk mendukung proses penyusunan artikel, semua kontribusi intelektual, interpretasi data, dan revisi akhir dilakukan oleh penulis. Tanggung jawab atas keakuratan, orisinalitas, dan integritas isi sepenuhnya berada pada penulis.

### **Daftar Singkatan**

SLR – *Systematic Literature Review*

PRISMA – *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*

DOAJ – *Directory of Open Access Journals*.

### **Pendanaan**

Penelitian ini tidak menerima pendanaan dari pihak manapun.

### **Ketersediaan Data dan Bahan**

Penelitian ini adalah penelitian dengan metode studi literatur. Semua sumber telah dicantumkan dalam daftar Pustaka.

## **REFERENSI**

- Barbera, C., Grossi, G., Steccolini, I., & Papenfuß, U. (2025). Governance and accountability in reshaping public services: Open challenges and wicked problems of the 21st century. *Public Administration*, 103(1), 1–20. <https://doi.org/10.1111/padm.70012>
- Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmelikhuijsen, S. (2017). 25 years of transparency research: Evidence and future directions. *Public Administration Review*, 77(1), 32–44. <https://doi.org/10.1111/puar.12685>
- Grimmelikhuijsen, S. G., & Feeney, M. K. (2017). Developing and testing an integrative framework for open government adoption in local governments. *Public Administration Review*, 77(4), 579–590. <https://doi.org/10.1111/puar.12689>
- Grimmelikhuijsen, S., & Knies, E. (2017). Validating a scale for citizen trust in government organizations. *International Review of Administrative Sciences*, 83(3), 583–601. <https://doi.org/10.1177/0020852315585950>
- Krah, R. D., & Mertens, G. (2020). Transparency in local governments: Patterns and practices of twenty-first century. *State and Local Government Review*, 52(4), 283–294. <https://doi.org/10.1177/0160323X20970245>
- Lourenço, R. P., Piotrowski, S., & Ingrams, A. (2017). Open data driven public accountability. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 11(1), 42–57. <https://doi.org/10.1108/TG-12-2015-0050>
- Mabillard, V., & Zumofen, R. (2017). The complex relationship between transparency and accountability: A synthesis and contribution to existing frameworks. *Public Policy and Administration*, 32(2), 110–129. <https://doi.org/10.1177/0952076716653651>

- Meijer, A., 't Hart, P., & Worthy, B. (2018). Assessing government transparency: An interpretive framework. *Administration & Society*, 50(4), 501–526. <https://doi.org/10.1177/0095399715598341>
- Overman, S., & Schillemans, T. (2022). Toward a public administration theory of felt accountability. *Public Administration Review*, 82(1), 12–22. <https://doi.org/10.1111/puar.13417>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pérez-Durán, I. (2024). Twenty-five years of accountability research in public administration: Authorship, themes, methods, and future trends. *Public Administration*, 102(1), 3–23. <https://doi.org/10.1177/00208523231211751>
- Piotrowski, S. J. (2017). The "open government reform" movement: The case of the open government partnership and U.S. transparency policies. *American Review of Public Administration*, 47(2), 144–171. <https://doi.org/10.1177/0275074016676575>
- Samaratunge, Q. (2021). Accountability and transparency in emerging countries: Governance, democratic currents and change. *Public Administration and Development*, 41(4), 147–156. <https://doi.org/10.1002/pad.1963>
- Schillemans, T. (2015). Managing public accountability: How public managers manage public accountability. *International Journal of Public Administration*, 38(6), 433–441. <https://doi.org/10.1080/01900692.2014.949738>
- Schillemans, T. (2016). Calibrating public sector accountability: Translating experimental findings to public sector accountability. *Public Management Review*, 18(9), 1400–1420. <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1112423>